adalah devisa dalam valuta United States Dollar (USD), Japanese Yen (YPY), Deutsche Mark (DEM), Netherland Guilder (NLG) dan Great Britain Pound (GBP). DHE dalam valuta selain kelima valuta tersebut, apabila akan dijual ke Bank Indonesia wajib dikonversikan terlebih dahulu ke dalam USD. Dan pembelian DHE itu dilakukan dengan penyerahan nilai lawan Rupiah berdasarkan kurs beli Bank Indonesia yang terjadi pada tanggal transaksi. Adapun tanggal transaksi tersebut, adalah tanggal pada saat bank devisa menyerahkan Aplikasi Penjualan Devisa Hasil Ekspor (APDHE) kepada Bank Indonesia atau tanggal penerimaan tested teleks pengganti APDHE oleh Bank Indonesia.

Dalam hal tata cara jual beli DHE, menurut pasal 9, penjualan DHE dilakukan oleh Bank Devisa dengan ketentuan sebagai berikut : a) Bagi bank devisa yang berkedudukan sekota dengan kantor Bank Indonesia, dilakukan dengan penyerahan APDHE, b) Bagi bank devisa yang berkedudukan tidak sekota dengan kantor Bank Indonesia dapat dilakukan dengan : 1) Penyerahan APDHE, atau 2) Tested teleks pengganti APDHE, c) Bank devisa yang berkedudukan di DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek) serta mempunyai rekening koran pada Bagian Akunting Thamrin, penjualan DHE hanya dapat dilakukan dengan APDHE dan langsung disampaikan kepada Bagian Pengelolaan Devisa (PDv). d) Demikian pula, bagi yang mempunyai rekening koran pada Bagian Akunting Kota, Penjualan DHE hanya dapat dilakukan dengan APDHE dan langsung disampaikan kepada Bagian Akunting Kota (AkK).

e) Penjualan DHE pada dasarnya diajukan oleh eksportir yang melaksanakan ekspor barang melalui bank devisa yang menandasahkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan mempunyai tagihan ke luar negeri.

Itu antara lain seputar ketentuan jual-beli devisa hasil ekspor. □

Penguasaan tanah di Kelurahan Bidaracina dan Kebun Baru

Penetapan penguasaan perencanaan atas bidang tanah seluas lebihkurang 18,38 hektar di Kelurahan Bidaracina, — Kecamatan Jatinegara — Jakarta Timur dan Kelurahan Kebun Baru — Kecamatan Tebet — Jakarta Selatan. Dan tanah seluas lebihkurang 3,73 hektar di Ex Kalimati Kelurahan Bidaracina — Kecamatan Jatinegara — Jakarta Timur untuk peremajaan kota (termasuk di dalamnya normalisasi kali Ciliwung dan pembangunan Rumah Susun Murah serta fasilitasnya), sesuai peta lampiran No: 01/T/DTK/PRK/II/94. Demikian ketetapan Gubernur KDKI Jakarta dalam surat keputusannya No: 242 tahun 1994 yang mulai berlaku tanggal 17 Pebruari 1994.

Ketentuan tersebut diambil antara lain dengan pertimbangan, dalam rangka penataan permukiman kumuh di Daerah Aliran Sungai Ciliwung serta peningkatan kualitas lingkungan maka dibutuhkan program peremajaan kota yang termasuk di dalamnya normalisasi Kali Ciliwung dan pembangunan Rumah Susun Murah. Untuk itu, bidang tanah sepanjang Kali Ciliwung lebihkurang seluas 18,38 hektar (termasuk di dalamnya trase normalisasi kali) yang berada di wilayah Kelurahan Bidaracina — Jakarta Timur dan Kelurahan Kebon Baru — Jakarta Selatan itu, dinilai memenuhi syarat untuk peremajaan kota. Juga, bidang tanah seluas lebihkurang 3,73 hektar yang terletak di Ex Kalimati Kelurahan Bidaracina — Jakarta Timur, dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan Rumah Susun Murah dan fasilitasnya, guna menunjang penataan DAS Ciliwung.

Menurut keputusan ini, pembangunan dalam rangka peremajaan pada lokasi sebagaimana disebutkan itu, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Gubernur KDKI Jakarta. Kecuali dalam rangka peremajaan tersebut, maka pada lokasi dimaksud dilarang untuk: 1) membangun, memanfaatkan apapun, kecuali dalam rangka pembangunan peremajaan dimaksud, 2) mengeluarkan hak yang baru atas tanah, maupun perpanjangan hak atas tanah yang habis masa berlakunya, dan 3) mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain, kecuali dalam ihwal: Waris.

Demikian antara lain keputusan Gubernur KDKI Jakarta tersebut dan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Menekan inflasi dan sukubunga

Laju inflasi dan sukubunga deposito berjangka, bagaikan lepat dengan daunnya, demikian pemeo yang beredar dalam kalangan pemilik modal ''ngganggur''. Itu antara lain yang mendorong mereka memperhitungkan perkembangan laju inflasi pada tahun yang bersangkutan, sebelum menitipkan dananya pada tabungan deposito, misalnya. Alasannya, keuntungan yang diperoleh mereka, hanya dari selisih angka sukubunga dikurangi dengan laju inflasi sebagai penyusutan nilai dana. Lantas timbul tanya: bagaimana perkembangan laju inflasi dan sukubunga deposito berjangka?

Data Biro Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, duabulan terakhir kumulatif inflasi tercatat: 3,01 persen, dengan perincian pada Januari dan Pebruari 1994 masing-masing mencapai 1,25 persen dan 1,76 persen. Angka ini lebih rendah ketimbang periode yang sama 1993 lalu yang tercatat: 4,95 persen. Demikian pula, kumulatif inflasi menurut tahun anggaran 1993/94 — April 1993 sampai Pebruari 1994 — mencapai 6,34 persen. Atau lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun anggaran 1992/93 yang tercatat: 8,54 persen.

Sebagaimana diketahui, laju inflasi pada 1993 lalu mencapai 9,77 persen. Angka ini merupakan yang terbesar sejak limatahun ini, bahkan terbesar sejak sepuluhtahun terakhir. Memang, kala itu laju inflasi diwarnai oleh kenaikan harga bahan bakar, kenaikan HPS semen dan tarif angkutan.

Mengingat laju inflasi yang tinggi kurang baik terhadap kegiatan ekonomi, pemerintah berusaha keras mengendalikan dan menekannya dengan berbagai langkah. Misalnya, gaji pegawai negeri dan ABRI tidak naik, disamping tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak dan tarif angkutan, seperti harga pada awal Januari 1993 lalu. Dan upaya ini tampak memberikan hasil yang memadai, dimana laju inflasi menurut tahun anggaran 1993/1994 lawan 1992/93 ternyata lebih rendah. Demikian pula, laju inflasi duabulan terakhir, sebagaimana disebutkan di atas.

Justru itu, menurut kalangan pengusaha dan pengamat, selama 1994 ini laju inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 8,5 persen (bukan 7,5 persen, seperti tercetak pada edisi Pebruari lalu-red).

Apakah laju inflasi yang diperkirakan sejumlah itu akan mendorong para penabung menitipkan dananya? Memasuki triwulan pertama 1994 ini, sukubunga deposito yang dikenakan pihak perbankan pada umumnya berkisar 11 sampai 13 persen per tahun. Andaikan laju inflasi tahun ini berkisar 9 persen saja maka para penabung menarik keuntungan sekitar 2 sampai 4 persen setahun. Walaupun keuntungan itu tampak tipis ketimbang tahun-tahun lalu, konon bagi para penabung cukup memadai. Asalkan, dana yang dititipkannya itu, aman alias tidak mengalami kesulitan dalam penarikan kembali.

Sementara itu,baik bank-bank pemerintah maupun swasta, untuk menarik minat para nasabahnya tidak segan-segan pula menurunkan sukubunga pinjamannya. Misalnya, Bank BNI memasang tingkat bunga kredit 14 sampai 17 persen pertahun, dengan ketentuan 14 persen untuk pinjaman hingga Rp 25 juta, 15 persen untuk kredit usaha kecil dan 16 sampai 17 persen untuk pinjaman lainnya. ''Penetapan sukubunga tersebut ditentukan oleh masing-masing usaha yang dijalankan,'' ujar pihak Bank BNI. Disamping itu beberapa bank devisa swasta besar, dalam rangka untuk menggairahkan minat investasi di dalam negeri, menurunkan pula tingkat bunga pinjaman.

Bunga pinjaman khusus untuk pembiayaan investasi itu, menurut pihak Departemen Keuangan, sekitar 15 sampai 16 persen per tahun. Sedangkan untuk modal kerja, sekitar 16 sampai 18 persen setahun, seperti yang diberikan Bank Bali, BCA dan Bank Buana.

Penurunan bunga pinjaman itu, terkait erat dengan usaha perbankan swasta berbenah diri. Sehingga spread yang tadinya pada tingkat 8 sampai 10 persen, dapat ditekan menjadi sekitar 4 — 5 persen pada awal 1994 ini.

Nah, itu gambaran sekilas tentang laju inflasi dan sukubunga yang tampaknya masih diupayakan terus turun guna merangsang para nasabah prima melakukan investasi.☐

Sambungan dari halaman 80

petitif di pasaran luar negeri, sedangkan di dalam negeri justru mengalami kelebihan pasok.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Produsen Besi dan Baja Seluruh Indonesia (Gapbesi) — Suhendro Notowidjojo sebagaimana dikutip ''BI'' membenarkan tentang turun dan naiknya harga scrap tersebut. ''Ini mengakibatkan turun atau naiknya biaya produksi sehingga menjadi salah satu kendala bagi pengusaha besi baja di Indonesia untuk bersaing di pasar internasional,' katanya.

Suhendro memperlihatkan catatan: pada Maret 1994 lalu harga scrap itu, mencapai USD 155 per ton, sedangkan bulan sebelumnya — Pebruari mencapai USD 160 per ton. Harga ini melonjak tajam bila dibandingkan Juni 1993 lalu yang tercatat hanya USD 120 per ton.

Terbatasnya prasarana pelabuhan, menurut Suhendro, juga mengakibatkan mahalnya scrap impor karena tidak mampu menampung pembongkaran bahan baku tersebut dalam jumlah besar.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut agaknya, Menteri Perindustrian menyarankan kepada para produsen baja, untuk meninggalkan pemakaian baja bekas itu sebagai bahan baku.

Dalam hal ini salah satu teknologi mutakhir dalam memproduksi besi dan baja adalah hot metal production process (Corex), dimana tanpa menggunakan scrap sebagai bahan baku, disamping mengurangi pemakaian tenaga listrik bila dibanding pabrik-pabrik baja konvensional.

Wapresdir PT Voest-Alpine Industrieanlagenbau (VAI) — Horst Wiesinger dari Austria dalam suatu seminar yang berlangsung di Jakarta belum lama berselang memperkenalkan dan menawarkan teknologi baru untuk memproduksi baja tersebut. Teknologi produksi baja dengan proses Corex hanya memerlukan biji besi dan batubara dan bahan baku ini persediaannya di Indonesia sangat melimpah.

Menurutnya, dengan teknologi baru itu biaya produksi dapat ditekan sampai 25 persen dari sistem produksi menggunakan blast furnace yang masih banyak digunakan pabrik baja di Indonesia. Sistem Corex ini, juga mampu memproduksi baja dalam jumlah kecil, misalnya 100.000 ton per hari. Sedangkan tanur biasa minimal sekitar 250.000 ton per hari. Iapun menjelaskan, bahwa harga unit pabrik Corex —C- 1000 dengan kapasitas 100.000 ton per hari mencapai sekitar USD 100 sampai USD 150 juta.

Menjawab pertanyaan, kalangan produsen baja menilai, sistem Corex ini lebih mahal ketimbang sistem blast furnace. Namun, salah seorang produsen yang tidak ingin disebut namanya sambil tersenyum berkata: kalah membeli, menang memakai seperti dikatakan pepatah itu, bukan semata-mata bagi masyarakat konsumen, juga produsen.☐

Sambungan dari halaman 17

Mawas diri

Ada pula peserta sarasehan yang menyatakan, karya-karya yang dipamerkan memperlihatkan bahwa AMI lebih berorientasi pada klien-klien individual, kurang berorientasi pada lingkungan dan sosial. Mungkin itu menyiratkan memang kemampuan menjelajahnya hanya sebatas itu saja. Dengan melihat manifestonya, tampak bahwa memang AMI hendak membuat kelas tersendiri yang eksklusif, mau menjelajah di dunia khayal, tidak di dunia nyata.

Dipl.Ing. Harisanto berkomentar, sebaiknya yang dijelajahi adalah hal-hal yang bisa dicapai. Karya-karya yang belum berhasil direalisasikan hendaknya mengandung aspek itu. ''Awaslah terhadap gap antara khayal dan bisa,'' katanya. Arsitek muda semestinya sadar akan batasan problem yang ingin mereka olah dalam bentuk karya. Sebab, sebagian besar rakyat Indonesia adalah bermukim di pedesaan, pegunungan, tepi sungai dan pantai, bukan di kota-kota besar.

Desentralisasi mulai dilakukan pada Pelita VI. Keputusan-keputusan untuk kebutuhan Kabupaten dan Kotamadya akan terjadi di Tingkat II. ''Hendaknya ini dicermati. Bagaimana agar klien di Tingkat II ini mampu menanggapi proses-proses yang kalian jelajahi itu, dan kalian bisa klop dengan proses-proses yang kelak terjadi di Tingkat II. Mereka mungkin akan bicara kebutuhan fasilitas umum, yang boleh jadi tidak menarik bagi kalian,'' lanjut Harisanto.

Tantangan yang dihadapi AMI, tambahnya, bukanlah mencari pengakuan eksistensi di tengah persaingan ketat kini. Yang paling sukar justru untuk hidup di kedamaian, mendayagunakan sinergi yang ada, untuk kejayaan kreativitas. Untuk memperoleh pengakuan, demikian Harisanto, dibutuhkan dua syarat sekaligus: keberhasilan subjektif dan keberhasilan objektif.

Apapun yang dikomentari para pengunjung pameran dan peserta sarasehan, selayaknya itu menjadi masukan buat AMI berbenah diri dalam mempersiapkan pameran besar yang sedianya akan diselenggarakan tahun ini. Tentu temanya tidak lagi utak-atik bentuk, atau kotak-katik kota kita, seperti rencana semula. Kita tunggu saja.☐ Rahmi Hidayat / Foto : Dokumentasi Yori Antar.

''Awaslah terhadap gap antara khayal dan bisa.'' Arsitek muda semestinya sadar akan batasan problem yang ingin mereka olah dalam bentuk karya.

Rapat Pengurus

Untuk kali ini secara marathon berlangsung sebanyak empat kali masing-masing pada tanggal: Kamis, 3 Pebruari 1994, Kamis, 10 Pebruari 1994, Rabu, 16 Pebruari 1994 dan Selasa, 22 Pebruari 1994. Berlangsung secara marathon disamping dihadiri oleh Pengurus, juga dihadiri oleh Staf Pengurus. Rapat Pengurus kali ini khusus membahas konsep revisi Kep.Pres no. 29/ 1984.

Diawali dengan Rapat pada tanggal 22 Januari 1994 dengan Kepala Biro Perlengkapan Dep. PU, dimana wakil-wakil AKI-Gapensi bertukar pikiran mengenai konsep revisi Kep.Pres. Lampiran III, maka selanjutnya rapat-rapat Pengurus dilangsungkan. Dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperoleh dalam Rapat Bappenas dan Asosiasi-Asosiasi dalam Kadin Indonesia, maka pembahasan dan penyusunan usul-saran AKI semakin terbentuk.

Pada kesempatan Rapat Pengurus terakhir tanggal 22 Pebruari 1994 dilaporkan pula Aplikasi PT Bingah untuk menjadi anggota AKI. Mengingat persyaratan menjadi anggota sudah dipenuhi, maka aplikasi perusahaan tersebut dapat diterima anggota Biasa per bulan Pebruari 1994.

Kegiatan seminar dan sejenis

Pada akhir Januari dan awal Pebruari 1994 telah berlangsung beberapa kali kegiatan Seminar/Lokakarya baik yang diikuti oleh Anggota AKI maupun yang diikuti oleh Peserta diluar AKI, baik yang diselenggarakan bekerja sama dengan Penyelenggara profesional maupun bekerja sama dengan Inkindo, Gapensi atau lainnya dapat disebutkan:

1) Tanggal 24 dan 25 Januari 1994, berlangsung di Indonesia Property Conference 1994, dihadiri oleh lebih kurang 40 peserta. Salah satu Pembicara adalah Dirut. PT Total Bangun Persada, sedangkan Chairman Seminar adalah Direktur Eksekutif AKI. Conference diselenggarakan oleh Business Focus Singapore bekerja sama dengan AKI, dimana peserta AKI mendapat rabat sebesar 10 persen.

2) Tanggal 7 dan 8 Pebruari 1994 berlangsung Seminar Kontrak Konstruksi yang diselenggarakan oleh Cemantech Singapore bekerja sama dengan AKI. Dua dari para Pembicara adalah dari AKI masing-masing Sekretaris Jenderal AKI dan Ir. Saronto dari PT Total Bangun Persada. Dari jumlah peserta yang hadir sebanyak lebih kurang 45 orang, beberapa peserta adalah anggota AKI dimana mereka menikmati rabat 10 persen. Bertindak selaku Chairman pada hari pertama adalah Direktur Eksekutif.

3) Lokakarya Sehari ''meningkatkan Daya Saing Perusahaan'' yang diselenggarakan bersama AKI, INKINDO dan GAPENSI telah berlangsung pada tanggal 9 Pebruari 1994. Para pembicara adalah masing-masing DR. Ir. Poernomosidi Hadjisarosa dan DR. Ir. Koentoro Mangkusubroto, Dirut. PT Timah/ Dirjen. Pertambangan Umum. Tercatat hadir sebanyak lebih kurang 80 orang.

4) Tanggal 7-10 Pebruari 1994 dilangsungkan pula Lokakarya K3 yang diselenggarakan oleh Kanwil Dep. PU. Jatah yang dialokasikan kepada AKI sebanyak 20 peserta terpakai seluruhnya. Bahkan beberapa anggota tidak bisa berpartisipasi karena terlambat mendaftar.

5) Kegiatan Sertifikasi GS Angkatan ke-13 ditutup pada tanggal 5 Pebruari 1994. Selama bulan Ramadhan kegiatan Sertifikasi dihentikan dan akan dilanjutkan setelah Hari Raya. Sejauh ini kegiatan Sertifikasi sudah diikuti oleh lebih kurang 1000 Peserta dan lebih kurang 300 perusahaan kontraktor jalan.

6) Uji Ketrampilan/Sertifikasi Tower Crane Operator akan berlangsung dalam waktu dekat. Penyelenggara adalah kerja sama Kanwil Depnaker dengan beberapa Asosiasi Profesi terkait. Adapun Test Teori yang diikuti oleh 38 Peserta telah berlangsung tanggal 8 Maret 1994 bertempat di Kantor Kanwil PU DKI. Sedangkan Test Praktek dimulai berturut-turut dari tanggal 22 s/d 25 Maret 1994.

7) Adapun beberapa Kegiatan Seminar/ Training diwaktu mendatang adalah: a) Lokakarya Quantity Surveyor oleh Lembaga Juru Ukur Malaysia, b) Project Management Training di Sydney Australia dari tanggal 16 April s/d 17 Mei 1994.

Kegiatan lain-lain

• Tanggal 15 Pebruari 1994, Direktur Eksekutif hadir mewakili AKI memenuhi Undangan Pemda. DKI dalam rangka mencoba menyusun Redaksi Pengumuman Tender-Tender Proyek DKI.

• Tanggal 24 Pebruari 1994, sebagai kelanjutan Undangan Pemda DKI Kadinda Jakarta mengundang pula untuk membahas mekanisme partisipasi perusahaan-perusahaan anggota Asosiasi Profesi. Dibahas dalam Rapat Kadinda adalah: -Keanggotaan & Persyaratan, -Iuran, -Sekretaris Bersama Pendaftaran Anggota, -Pola Pembinaan. Hadir mewakili AKI adalah Direktur Eksekutif.

• Setelah beberapa waktu tidak berlangsung Rapat, maka Pusbinlat kembali mengundang Rapat membahas beberapa SKB pada tanggal 28 Pebruari 1994.

• Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum memanggil hadir AKI dan Gapensi membahas Proses Tender pada tanggal 29 Pebruari 1994. Hadir Wakil Ketua II, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Direktur Eksekutif sifat Rapat tukar pendapat dan dirasa perlu menyusun Team Kecil.☐

Sambungan dari halaman 78

partemen Koperasi, anggotanya: Direktur di Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Selain tim pengarah, juga ada tim teknis yang melibatkan unsur-unsur di luar pemerintah, seperti: Asosiasi REI, Kadin, Induk Koperasi Karyawan(Inkopkar) dan swasta serta BTN; agar konsep mengenai skim ini merupakan hasil dari berbagai pandangan.

Sejauh ini, jelas Asisten IV Menpera ini, ada 3 konsepsi dasar yang akan berperan dalam skim di Indonesia.

Pertama, penentuan jumlah kontribusi tidak dinyatakan dalam bentuk prosentase, tetapi dalam bentuk absolut; seperti halnya TPPNS.

Kedua, Sejauh mungkin melibatkan koperasi, khususnya koperasi karyawan. Sehingga lembaga yang telah ada dalam tubuh perusahaan tersebut dapat lebih berperan aktif dan dapat berfungsi sebagai jembatan. Meski diakui pula bahwa kini telah ada beberapa koperasi karyawan perusahaan yang telah berperan dalam mengusahakan perumahan bagi anggotanya, seperti PT Unitex Bogor.

Ketiga, diharapkan adanya peran dari pada serikat pekerja, untuk dapat berfungsi membela kepentingan karyawan di perusahaan.

Jika dikaitkan dengan sumber dana untuk pembiayaan perumahan secara keseluruhan, seolah-olah terlepas dengan pembiayaan nasional atau istilahnya dalam ekonomi *special circuit*. Hal ini terjadi, jelasnya kembali, pembangunan perumahan berasal dari dana-dana melalui pemerintah dan KLBI dengan suku bunga rendah. Rendahnya suku bunga ini tentunya akan dapat mengganggu terhadap suku bunga yang berlaku di masyarakat. Keadaan ini yang menyebabkan keengganan masyarakat menabung untuk perumahan. Hal ini yang harus sedikit demi sedikit dihindari, harapnya.

Kenyataan lainnya seolah-olah antara sektor formal dan informal berdiri sendiri. Dan skim Tabungan Perumahan Karyawan Perusahaan ini dimaksudkan untuk mengaitkan kedua sektor tersebut. Kami pun berharap agar masyarakat mampu membangun rumahnya dengan bertumpu pada kemampuan sendiri atau kelompok, demikian katanya diakhir pembicaraan.☐ Enny S

Sambungan dari halaman 30

supervisor lokal juga bisa baik,'' jelas Hario.

Disamping itu seorang supervisor juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan mental yang baik. Ia mengakui, kondisi di Indonesia saat ini banyak supervisor yang tidak memiliki pengalaman lapangan, kemudian ketika menjalankan tugasnya memiliki sikap tidak mau belajar, malah memerintah, dan keliru lagi. Akibatnya supervisor tersebut kurang dianggap. Kalau supervisor dari asing, banyak yang berasal dari lapangan, sehingga bisa memberikan alternatif pemecahan masalah, jika pekerja yang diawasi mengalami kesulitan.

Levy & Grant

Pekerja konstruksi tingkat mandor ke bawah, memang merupakan *grey-area*, artinya seolah-olah tidak ada yang mengurusi pembinaan ketrampilannya, kendati seperti diakui oleh kalangan kontraktor sendiri, juga memerlukan pekerja yang trampil. Sebenarnya kontraktor banyak dirugikan oleh kinerja pekerja konstruksi yang tidak trampil, meskipun upahnya relatif rendah. Namun, kenyataannya kontraktor menjadi membayar lebih mahal, akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan mereka di lapangan. Margin yang mepet serta kemungkinan pekerja itu dibajak kontraktor lain, jika sudah dibina, antara lain dijadikan alasan mengapa kontraktor tidak tertarik untuk membina ketrampilan pekerja lepas tersebut.

Menurut Hario, di Hongkong memang ada Badan yang khusus mengurusi hal itu, dan Badan tersebut mendapat iuran dari para kontraktor. Di Indonesia juga sudah dibentuk pola *Levy & Grant* oleh Depnaker, dengan maksud yang sama. Badan tersebut nanti juga akan memperoleh dana dari perusahaan-perusahaan. Maka dengan pola tersebut, dijamin adanya pemasokan tenaga trampil yang cukup, yang bisa digunakan oleh kalangan industri, termasuk industri konstruksi. Dengan memperoleh pekerja yang baik keborosan akan turun dan keuntungan akan naik. ''Dengan pola itu kontraktor tidak usah khawatir pekerja yang pintar diambil kontraktor lain, karena dia akan mendapat suplai lagi,'' jelasnya.

Jika pelatihan diselenggarakan sendiri oleh kontraktor, menurutnya, yang mahal bukan biaya pelatihannya, namun karena orang tersebut tidak bisa menghasilkan selama ia mengikuti pelatihan, atau disebut sebagai *opportunity forgone*. Apalagi untuk tingkat tukang, bukan saja biaya pelatihannya juga upah tukang itu selama pelatihan. Jadi, pelatihan untuk tukang akan lebih mahal dibanding pelatihan pelaksana lapangan. Dengan pola *Levy & Grant* iuran yang diberikan oleh kontraktor jelas akan lebih kecil dibanding jika ia menyelenggarakan pelatihan sendiri.

Kalau dana pelatihan untuk pekerja konstruksi dibebankan kepada anggaran pemerintah, tentu biayanya akan terbatas. Disamping itu, menurut Hario, para pengajarnya juga tidak tertarik untuk mengajar karena honorariumnya kecil. Di Depnaker, misalnya, memberikan honorarium kepada para pengajar maksimal Rp 10 ribu setiap jam, padahal kalau penyelenggaranya swasta bisa terima minimal Rp 50 ribu perjam. ''Kalau Pemerintah bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia, honor untuk pelatihnya harus cukup,'' himbaunya.

Pola *Levy & Grant* ini sudah ada peraturannya, dan sudah mulai dilaksanakan. Sebenarnya pola serupa sudah dilakukan oleh kontraktor BUMN, yang menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pembinaan perusahaan kecil. Namun, selama ini yang memperoleh dana tersebut masih kalangan asosiasi perusahaan, jadi perusahaannya yang dibina. Ia menilai, mustinya perlu diberikan juga untuk peningkatan ketrampilan para pekerjanya, kalau demikian maka dana tersebut juga perlu diberikan kepada asosiasi profesi.

Kondisi kinerja pekerja konstruksi yang masih rendah menimbulkan kerugian, baik di sisi kontraktor maupun pemilik proyek. Kontraktor dirugikan akibat pemborosan di lapangan, yang dapat mengurangi tingkat profitnya. Di sisi lain karena desain dibuat lebih konservatif, untuk mengantisipasi workmanship pekerja yang masih rendah, juga menyebabkan biaya proyek lebih besar. Dengan demikian, peningkatan kinerja para pekerja konstruksi, bukan saja menguntungkan pihak pemborong juga pemilik proyeknya. Dan jika pembinaannya bisa dilakukan secara baik, tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh devisa dari ekspor tenaga kerja trampil di sektor konstruksi ini.☐

(Urip Yustono/Ratih/Rakhidin)

Sambungan dari halaman 70

Penyelidikan tanah yang terencana

Pemecahan persoalan tersebut seringkali dapat diatasi tidak dengan melulu menambah biaya penyelidikan tanah saja, tapi dapat dengan membuat suatu perencanaan penyelidikan tanah yang matang yang dibuat oleh seorang spesialis geoteknik yang sekarang ini sudah semakin banyak di Indonesia.

Seringkali biaya terbuang percuma dengan melakukan penyelidikan tanah dengan melakukan pengeboran di dalam pola grid dan juga program pengetesan lapangan yang sangat banyak. Yang lebih baik tentu saja dengan melakukan penyelidikan tanah di lokasi yang memang informasi tanahnya sangat diperlukan. Informasi yang berharga pada tahap awal malah kadang-kadang dapat diperoleh tanpa harus melakukan pekerjaan lapangan dengan biaya operasional tinggi. Misalnya, berdasarkan studi literatur dan perbandingan dengan pondasi tetangga dapat membantu dalam proses desain awal. Namun hal-hal tersebut masih jarang mendapat perhatian.

Keterlibatan seorang spesialis geoteknik seharusnya berlangsung sejak awal proyek sampai pada tahap pelaporannya. Mungkin hanya kurang dari 10 persen proyek-proyek penyelidikan tanah yang berlangsung disini ditangani oleh spesialis geoteknik. Dalam hal ini, penggunaan jasa spesialis geoteknik sebagai konsultan yang terpisah dari penggunaan kontraktor lain sebagai pelaksana pekerjaan fisik dan pengetesan tanah akan merupakan suatu bentuk kerjasama tim penyelidik tanah yang ideal.

Sampai saat ini belum ada suatu standar baku untuk metoda dan prosedur penyelidikan tanah di Indonesia yang sesuai dengan kondisi tanah dan praktek yang biasa diterapkan. Dalam hal ini, memang diperlukan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ataupun asosiasi profesi yang terlibat untuk melakukan urun rembug dan diskusi yang dapat menghasilkan semacam pedoman secara nasional. Program-program yang mendesak untuk dilakukan antara lain:

- Menyusun pedoman nasional perencanaan dan prosedur penyelidikan situs atau penyelidikan tanah;
- Menyusun pedoman atau sistem pengendalian mutu dari hasil penyelidikan situs atau penyelidikan tanah;
- Mempromosikan program kepedulian terhadap pentingnya masalah geoteknik dan tanah untuk proyek-proyek bangunan dan jalan kepada para klien pemilik proyek dan juga para konsultan dan kontraktor; dan juga keuntungan yang akan diperoleh bila melakukan penyelidikan tanah dengan terencana dan baik, khususnya dengan keterlibatan seorang spesialis geoteknik.☐

Penulis bekerja di PT. JATA NURMAN Consulting Engineers

SELAMAT

Atas Beroperasinya

GEDUNG UNIVERSITAS JAYABAYA

JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENAYAN. JAKARTA 10270. INDONESIA
TEL : (021) 5731302, 5731675, 5731683, 5733220
FAX : (021) 5734616

P.T. MECO SYSTECH INTERNUSA

MECHANICAL & ELECTRICAL CONSULTANT

Jl. Raya Kebayoran Lama No. 194 A/B 8
Jakarta 12220 - Indonesia
Phone : 7390817, 7390841 Fax. : 7390299

AIR CONDITIONING, SANITARY ENGINEERING, ELEVATOR & ESCALATOR, FIRE PROTECTION SYSTEM, LIGHTING & POWER INSTALATION, BUILDING AUTOMATION SOUND & COMMUNICATION SYSTEMS, LIGHTING PROTECTION SYSTEM

CONSULTING ENGINEERS.

Jl. Tanjung Duren Raya No. 90, Jakarta 11470
Telp : 5605096, Fax : (021) 5666573-5686010
Anggota Inkindo : 09172/P/0604-DKI

PT JAYA TEKNIK INDONESIA

Mechanical & Electrical Contractor

AUTHORIZED DISTRIBUTOR :

AIR CON. and REFR. SYSTEMS, USA

STAINLESS STEEL PRODUCTS

P.T. GEMA KARYA ABADI

JL. GAJAH MADA 16M - JAKARTA
TELP : 372308 (5 LINES) FAX.: (62-21) 3809208

P.T. HARDI AGUNG PERKASA

ENGINEERS & CONTRACTORS

JL. TEBET TIMUR RAYA No. 42, JAKARTA SELATAN
TELEPHONE : 8294085-8303920-8300695-8300743
FAX : 62 - 21 - 8292434
CABLE : HARTRADE
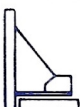
P.T. HAMMER SAKTI

JL. BOULEVARD RAYA BLOK WA-2 NO 19
KELAPA GADING PERMAI, JAKARTA 14240
TELP.(021) 451 0145-4510245 FAX. (021) 4510445

- **Manufacturer of High Quality Precast/Prestressed Solid Square Foundation Piles.**
- **We are Specialists On Shore Piling :**
  1. **Precast/Prestressed Concrete Piles.**
  2. **Sheet Piles.**
  3. **Steel Pipe Piles.**
  4. **Steel H Section Piles.**

FIRE DOOR, LOOKS & BUILDING HARDWARE
OFFICE FURNITURE SYSTEM

Jl. Tanah Abang 2 No. 7 Jakarta 10160
Phone : (021) 3841213 (18 Lines) - Fax : (021) 3805932

P.T. PARAMATEGAK BETON INDONESIA

Jl. Pegangsaan Dua No. 66 Km.3 Jakarta Utara 14250
Phone : 4602872 (Hunting) Fax : (021) 4602874

- **Manufacturer of High Quality Precast/Prestressed Solid Square Foundation Pile**
- **Concrete Ready Mix**